

**PERATURAN BUPATI CIANJUR****NOMOR 06 TAHUN 2011****TENTANG****INDIKATOR KINERJA UTAMA**

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja utama Pemerintah Kabupaten Cianjur, perlu menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan;
- b. Bahwa sesuai Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Cianjur dan Organisasi Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b serta dalam rangka tertib administrasi, perlu diatur Indikator Kinerja Utama dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 12 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur Kabupaten Cianjur 2006-2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2010 Nomor 10 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.
2. Bupati adalah Bupati Cianjur.
3. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur.
4. Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis.

Pasal 2

- (1) IKU Pemerintah Daerah merupakan acuan yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah dan organisasi perangkat daerah untuk:
 - a. menyusun rencana strategis OPD;
 - b. menyusun rencana kinerja tahunan;
 - c. menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - d. melakukan evaluasi capaian kinerja; dan
 - e. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.
- (2) Uraian IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Setiap pimpinan OPD harus merumuskan dan mengusulkan IKU OPD.
- (2) Perumusan dan pengusulan IKU OPD harus selaras dengan:
 - a. IKU Pemerintah Daerah;
 - b. rencana strategis OPD;
 - c. bidang kewenangan, tugas dan fungsi OPD;
 - d. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja; dan
 - e. kebutuhan data statistik Pemerintah Daerah.
- (3) Usulan IKU OPD merupakan dasar penetapan IKU OPD yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Penetapan IKU OPD harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik, yaitu:
 - a. spesifik, bahwa indikator kinerja harus cukup jelas dan terfokus sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda;
 - b. dapat dicapai, bahwa indikator kinerja yang telah ditetapkan akan berguna apabila data mengenai target dan realisasinya dapat diperoleh;
 - c. relevan, bahwa indikator kinerja yang dipilih harus yang terkait dengan ukuran-ukuran yang relevan untuk mengukur keberhasilan pencapaian program dan tujuan organisasi;
 - d. dapat diukur, bahwa indikator kinerja dapat diukur dan dibandingkan dengan data yang lain secara objektif.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 28 Februari 2011
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 28 Februari 2011

PL SEKRETARIS DAERAH,



M. MUHAMMAD RUDDIN ALI

071231 198503 1 086

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2011 NOMOR 10

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 06 TAHUN 2011

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

No.	URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	ALASAN
1	2	3	4
1	URUSAN PENDIDIKAN		
1,1	Angka Melek Huruf (AMH)	%	Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Pendidikan terkait dengan pemberantasan buta huruf
1.2.	APK	%	Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Pendidikan terkait dengan perluasan akses / daya serap penduduk usia sekolah secara umum di setiap jenjang pendidikan
1.3.	APM	%	Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Pendidikan terkait dengan perluasan akses / daya serap penduduk usia sekolah tertentu di setiap jenjang pendidikan
1.4	RLS	Tahun	Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Pendidikan terkait dengan akumulasi investasi pendidikan individu
1.5.	Angka Pendidikan yang ditamatkan (APT)	%	Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Pendidikan terkait menyelesaikan pelajaran pada kelas tingkat akhir yang mendapatkan Ijazah /STTB
1,6	Angka lulusan yang terserap di dunia kerja dan PT	%	Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Pendidikan terkait kualitas lulusan pendidikan
2	URUSAN KESEHATAN		
2.1	Jumlah penurunan angka kematian Bayi (AKB)	org/10 ³	Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Kesehatan terkait dengan penurunan jumlah kematian Bayi
2,2	Jumlah penurunan Angka Kematian Ibu (AKI)	org/ 10 ³	Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Kesehatan terkait dengan penurunan jumlah kematian Ibu
2,3	Angka peningkatan usia harapan Hidup (UHH)	Tahun	Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Kesehatan terkait dengan harapan usia hidup
2,4	Angka penurunan gizi buruk penduduk	%	Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Kesehatan terkait dengan menurunnya gizi buruk
2,5	Rasio dokter terhadap 2500 satuan penduduk	orang/2,5 x 10 ³	Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Kesehatan terkait dengan keberadaan tenaga medis

1	2	3	4	
3	2,6	Perbandingan antara jumlah sarana prasarana kesehatan persatuan jumlah penduduk	Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Kesehatan terkait dengan keberadaan RS, Puskesmas, Pustu dan Pusling persatuan penduduk	
	PEKERJAAN UMUM			
	3,1	Jalan Kabupaten dalam kondisi baik (tingkat kerusakan ≤ 6%)	km	Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Pekerjaan Umum terkait dengan kondisi jalan kabupaten yang baik
	3,2	Jalan desa dalam kondisi baik	km	Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Pekerjaan Umum terkait dengan kondisi jalan desa yang baik
	3,3	Jembatan dalam kondisi baik	buah	Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Pekerjaan Umum terkait dengan kondisi jembatan yang baik
	3,4	Jaringan irigasi dalam kondisi baik	m	Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Pekerjaan Umum terkait dengan kondisi irigasi yang baik
3,5	Rasio jaringan Irigasi		Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Pekerjaan Umum terkait dengan kondisi irigasi dibandingkan dengan areal budidaya pertanian	
4	PERUMAHAN			
	4,1	Rumah tinggal bersanitasi	%	Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Perumahan terkait dengan rumah tinggal bersanitasi
	4,2	Rumah tangga yang menggunakan air bersih	%	Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Perumahan terkait dengan Rumah Tangga yang menggunakan air bersih
	4,3	Rasio rumah layak huni per jumlah rumah hunian	%	Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Perumahan terkait dengan Rumah yang layak huni
	4.4.	Jumlah perumahan Lingkungan Permukiman kumuh berkurang	%	Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Perumahan terkait dengan lingkungan permukiman kumuh
5	PENATAAN RUANG			
	5,1	Jumlah Fasos/fasum dalam kondisi baik	%	Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Penataan Ruang terkait dengan kondisi fasos/fasum
	5,2	Pemanfaatan lahan sesuai dengan dokumen RTRW	%	Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Penataan Ruang terkait dengan penggunaan lahan sesuai dengan dokumen Tata Ruang
6	PERENCANAAN PEMBANGUNAN			
	6,1	Dokumen RPJPD	Dok	Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Perencanaan Pembangunan terkait dengan dokumen perencanaan jangka panjang daerah
	6,2	Dokumen RPJMD	Dok	Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Perencanaan Pembangunan terkait dengan dokumen perencanaan jangka menengah daerah
	6,3	Dokumen RKPD	Dok	Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Perencanaan Pembangunan terkait dengan dokumen perencanaan tahunan daerah

1	2		3	4
	6,4	Sinergitas RPJMD dengan RKPD	%	Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Perencanaan Pembangunan terkait dengan sinergitas dokumen perencanaan RKPD dengan dokumen perencanaan RPJMD
7	PERHUBUNGAN			
	7,1	Jumlah Kendaraan Bermotor yang diuji	%	Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Perhubungan terkait dengan Kendaraan yang diuji Kendaraan Bermotor
	7,2	Rasio jumlah kendaraan terhadap kapasitas jalan	Ratio V/C	Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Perhubungan terkait dengan Jumlah Arus Kendaraan yang melewati jalan terhadap kapasitasnya
	7,3	Ruas jalan yang dilengkapi sarana prasarana lalu Lintas	%	Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Perhubungan terkait dengan Ketersediaan Sarana Prasarana lalu lintas Angkutan Darat
8	LINGKUNGAN HIDUP			
	8,1	Volume Sampah yang terkelola	m ³	Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Urusan LH terkait dengan Pengelolaan Persampahan
	8,2	Voleme Penanganan Sampah	m ³	Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Urusan LH terkait dengan Penanganan Persampahan
	8,3	Jumlah Ruang Terbuka Hijau	%	Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Urusan LH terkait dengan Penanganan Ruang Terbuka Hijau
	8,4	Jumlah Tempat Pembuangan Sampah terhadap satuan Penduduk	unit/penduduk	Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Urusan LH terkait dengan Ketersediaan Tempat Pembuangan Sampah
	8,5	Pencemaran Status Mutu Air menurun	lokasi	Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Urusan LH terkait dengan Pencemaran air
	8,6	Prosentase fasos/fasum kawasan bebas asap rokok	kawasan	Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Urusan LH terkait dengan Pencemaran udara
9	PERTANAHAN			
	9,1	Tanah milik Pemda yang bersertifikat meningkat	%	Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Pertanahan terkait dengan Pensertifikatan Aset Tanah Pemda
	9,2	Jumlah Kasus TN yang diselesaikan	kasus	Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Pertanahan terkait Penyelesaian Kasus Tanah Negara
10	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL			
	10,1	Kepemilikan KTP	%	Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil terkait dengan kepemilikan KTP
	10,2	Kepemilikan KK	%	Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil terkait dengan kepemilikan KK
	10,3	Kepemilikan Akta Kelahiran	%	Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil terkait dengan kepemilikan Akta Kelahiran

1	2	3	4
11	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN dan PERLINDUNGAN ANAK		
	11,1	%	Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan terkait dengan partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan
	11,2	%	Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan terkait dengan partisipasi Perempuan yang bekerja
	11,3	kasus	Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan terkait dengan menurunnya kasus KDRT
	11,4	kasus	Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan terkait dengan perlindungan hak perempuan dan anak
12	KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA		
	12,1	%	Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Urusan KB dan KS terkait dengan peserta KB aktif
	12,2	%	Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Urusan KB dan KS terkait dengan rata-rata jumlah anak yang dimiliki dalam satu keluarga
	12,3	%	Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Urusan KB dan KS terkait dengan tingkat kesejahteraan keluarga
13	SOSIAL		
	13,1	%	Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Sosial terkait dengan PMKS
	13,2	%	Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Sosial terkait dengan Penyediaan sarana dan prasarana bagi PMKS
	13,3	%	Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Sosial terkait dengan Pembinaan bagi PMKS

1	2	3	4
14	TENAGA KERJA		
14,1	Rasio Penduduk yang bekerja	%	Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Tenaga Kerja terkait dengan penyerapan tenaga kerja (usia kerja) yang mendapat pekerjaan
14,2	Jumlah penurunnya angka kecelakaan kerja	%	Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Tenaga Kerja terkait dengan Keselamatan Pekerja
14,3	Jumlah peningkatan tenaga kerja terampil	%	Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Tenaga Kerja terkait dengan Pembinaan /diklat bagi calon Tenaga Kerja
14,4	Jumlah Peningkatan Upah Minimum Kabupaten terhadap Upah Minimum Provinsi	Ribu	Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Tenaga Kerja terkait dengan Pendapatan Pekerja
14,5	Angka penurunan Pengangguran terbuka	%	Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Tenaga Kerja terkait dengan tingkat pengangguran
14,6	Angka tenaga kerja yang memiliki jaminan perlindungan	%	Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Tenaga Kerja terkait dengan Perlindungan Tenaga Kerja
15	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH		
15,1	Jumlah peningkatan koperasi yang aktif	koperasi	Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Koperasi dan UKM terkait dengan Kelembagaan koperasi yang sehat
15,2	Jumlah Peningkatan Pelaku Usaha Kecil Menengah	orang	Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Koperasi dan UKM terkait dengan perkembangan UMK
16	PENANAMAN MODAL		
16,1	Jumlah peningkatan angka investasi	Milyar Rp	Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Penanaman Modal terkait dengan Jumlah investasi yang masuk
17	KEBUDAYAAN		
17,1	Jumlah budaya lokal yang dapat dilestarikan	%	Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Kebudayaan terkait dengan Pelestarian Budaya Lokal
17,2	Jumlah Benda Cagar Budaya yang dapat dilestarikan	%	Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Kebudayaan terkait dengan Pelestarian Cagar Budaya
17,3	Jumlah peningkatan event seni dan budaya	kali	Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Kebudayaan terkait dengan Penyelenggaraan Even Seni dan Budaya
17,4	Rasio grup kesenian per 10000 penduduk	grup/10 ⁴	Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Kebudayaan terkait dengan Pelestarian Seni dan Budaya

1	2	3	4
18	PEMUDA DAN OLAH RAGA		
18,1	Jumlah peningkatan Peranserta Pemuda dalam Pembangunan	%	Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Pemuda dan Olah Raga terkait dengan Pembinaan Organisasi Kepemudaan
18,2	Jumlah peningkatan perolehan Medali Emas dalam event Olah raga	%	Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Pemuda dan Olah Raga terkait Prestasi yang diraih dalam Olah Raga
18,3	Jumlah peningkatan Atlit berbakat	%	Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Pemuda dan Olah Raga terkait sarana pencarian Bakat keolah Ragaan
19	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI		
19,1	Jumlah penurunan kasus akibat konplik politik Daerah	kasus	Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Kesbang dan Politik dalam Negeri jumlah kegiatan pembinaan politik daerah
19,2	Jumlah peningkatan LSM, Ormas dan OKP dalam kemandirian peran pembangunan berbangsa dan bernegara	%	Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Kesbang dan Politik dalam Negeri jumlah kegiatan pembinaan LSM,OKP, Ormas
19,3	Jumlah sarana prasarana dan tenaga yang memadai untuk penanggulangan bencana alam	unit/pddk	Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Kesbang dan Politik dalam Negeri terkait Penanggulangan Bencana alam
19,4	Jumlah penurunan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	%	Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Kesbang dan Politik dalam Negeri terkait dengan berkurangnya Penyakit Masyarakat (PEKAT)
19,5	Jumlah penurunan Pelanggaran terhadap Perda	%	Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Kesbang dan Politik dalam Negeri terkait dengan Pelanggaran terhadap Perda
19,6	Rasio Pol PP per 10000	orang/10 ⁴	Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah dalam Negeri Urusan Kesbang dan Politik dalam Negeri terkait dengan Ketersediaan Personel Pol PP
20	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN		
20,1	Jumlah peningkatan Peraturan Daerah yang mengakomodir kepentingan masyarakat	Perda	Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah terkait dengan kapasitas lembaga perwakilan rakyat Daerah fungsi legislasi dan budgeting

1		2	3	4
	20,2	Jumlah penurunan kasus pelanggaran Peraturan PerUndang-Undangan	%	Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah terkait dengan kapasitas lembaga perwakilan rakyat Daerah fungsi pengawasan
	20,3	Jumlah peningkatan Pelayanan keprotokolan Acara kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	%	Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah terkait dengan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
	20,4	Ketepatan Penetapan Perda APBD	Desember	Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah terkait dengan Ketepatan waktu penyusunan Perda APBD
	20,5	Ketepatan Perda Pertanggungjawaban APBD	Maret	Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah terkait dengan Ketepatan waktu penyusunan Perda Pertanggungjawaban APBD
	20,6	Sertifikasi Asset Daerah	%	Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah terkait dengan Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah
	20,7	Jumlah Peningkatan PAD terhadap APBD	%	Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah terkait dengan Sumber Pembiayaan Pembangunan dari PAD
	20,8	Opini BPK terhadap laporan Keuangan Pemerintah membaik		Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah terkait dengan Laporan Keuangan Pemerintah
	20,9	Jumlah penurunan temuan penyalahgunaan APBD oleh OPD	obrik	Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah terkait dengan Pengawasan
	20.10	Jumlah peningkatan tindaklanjut atas temuan penyalahgunaan APBD	obrik	Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah terkait dengan Pengawasan
	20.11	Jumlah SKPD yang telah menetapkan SOP meningkat	OPD	Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah terkait dengan Penetapan SOP dalam pelayanan
	20.12	Indeks Kepuasan Masyarakat		Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah terkait dengan Penyelenggaraan Pelayanan publik
	20.13	Jumlah peningkatan Pejabat yang memiliki kompetensi dibidangnya	orang	Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah terkait dengan Penempatan SDM sesuai Kompetensi jabatan
	20.14	Jumlah peningkatan Pegawai/pejabat yang mengikuti diklat Struktural	orang	Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah terkait dengan Peningkatan SDM jabatan Struktural
	20.15	Jumlah peningkatan Pegawai/pejabat fungsional yang mengikuti diklat Fungsional	orang	Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah terkait dengan Peningkatan SDM Jabatan Fungsional

1	2		3	4
	20.16	Jumlah Pejabat yang melaporkan Inpres 5/2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi	OPD	Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah terkait dengan Percepatan Pemberantasan Korupsi
	20.17	Rasio unit pemadam kebakaran persatuan penduduk	%	Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah terkait dengan Penanggulangan bencana kebakaran kabupaten
	20.18	Jumlah sarana prasarana pemerintahan desa yang baik	%	Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah terkait dengan sarana penyelenggaraan pemerintahan desa
	20.19	Jumlah peningkatan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai Perundang-Undangan	%	Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah terkait dengan Kebijakan /peraturan yang ditetapkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
	20.20	Jumlah Peningkatnya pemenuhan sarana prasarana aparatur sesuai dengan SPM	%	Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam penyelenggaraan Daerah
21	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
	21,1	Jumlah peningkatan SDM Perangkat Desa yang dilatih manajemen Pemerintahan Desa	Orang	Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terkait dengan SDM Perangkat Desa
	21,2	Jumlah penurunan KK miskin	KK	Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terkait dengan Menurunnya KK Miskin
	22,3	Jumlah Pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat secara swadaya atau partisipasi masyarakat	Rp	Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terkait dengan Partisipasi masyarakat dalam pembangunan
22	STATISTIK			
	22,1	Dokumen Indikator Makro Pembangunan yang mutakhir (Up to date)	Dok	Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Statistik terkait dengan ketersediaan data Makro yang up to date (mutakhir)
23	KEARSIPAN			
	23,1	Jumlah Peningkatan arsip pemerintah yang dikelola sesuai standar	Dok	Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Kearsipan terkait dengan pengelolaan arsip
	23,2	Jumlah Sarana prasarana pengelolaan arsip sesuai standar	unit/buah	Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Kearsipan terkait Ketersediaan sarana prasarana pengelolaan kearsipan

1	2	3	4
24	PERPUSTAKAAN		
24,1	Jumlah Peningkatan pengunjung perpustakaan	orang	Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Perpustakaan terkait dengan Perpustakaan
24,2	Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan	jenis	Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Perpustakaan terkait ketersediaan sarana dan prasarana Perpustakaan
25	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
25,1	Updating informasi website pemkab	Informasi	Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Komunikasi dan Informatika terkait dengan Updating Pemberitaan daerah
25,2	Jumlah Peningkatan Pengunjung website pemkab	pengunjung	Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Komunikasi dan Informatika terkait dengan Pemanfaatan website Pemkab
25,3	Jumlah peningkatan Jaringan E-Government	Sistem	Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Komunikasi dan Informatika terkait dengan Penerapan E-Government
26	KETAHANAN PANGAN		
26,1	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Pangan Daerah	%	Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Ketahanan Pangan terkait dengan Ketersediaan Pangan daerah
27	PERTANIAN		
27,1	Jumlah peningkatan produksi tanaman pangan	ton	Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Pertanian terkait dengan jumlah produksi tanaman pangan
27,2	Jumlah peningkatan produktivitas tanaman pangan	ton/ha	Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Pertanian terkait dengan jumlah produksi tanaman pangan persatuan luas
27,3	Jumlah peningkatan produksi tanaman hortikultura	kwintal	Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Pertanian terkait dengan jumlah produksi tanaman hortikultura
27,4	Jumlah peningkatan Produksi peternakan	kwintal	Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Pertanian terkait dengan jumlah produksi peternakan
27,5	Jumlah Peningkatan Produksi tanaman perkebunan	kwintal	Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Pertanian terkait dengan jumlah produksi tanaman perkebunan
28	KEHUTANAN		
28,1	Jumlah Penurunan lahan kritis	ha	Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Kehutanan terkait dengan berkurangnya lahan kritis
28,2	Jumlah peningkatan produksi hutan kayu	m ³	Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Kehutanan terkait dengan produksi hasil hutan Industri
	Jumlah penurunan pembalakan liar	kasus	Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Kehutanan terkait dengan pembalakan hutan

1	2	3	4
29	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL		
	29,1	%	Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral terkait pemanfaatan/pengelolaan Sumber Daya Mineral
	29,2	org	Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral terkait penambangan liar
	29,3	Juta	Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral terkait Kontribusi PAD dari Sektor ESDM
30	PARIWISATA		
	30,1	orang	Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah urusan pariwisata terkait dengan jumlah kunjungan wisatawan
	30,2	ODTW	Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah urusan pariwisata terkait dengan pengelolaan ODTW jumlah kunjungan
	30,3	Juta	Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah urusan pariwisata terkait dengan PAD yang masuk dari sektor pariwisata
31	KELAUTAN DAN PERIKANAN		
	30,1	Ton	Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah urusan kelautan dan perikanan terkait dengan produksi perikanan budidaya ikan
	30,2	ton	Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah urusan kelautan dan perikanan terkait dengan produksi ikan laut nelayan
	30,3	juta	Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah urusan kelautan dan perikanan terkait Kontribusi PAD dari sektor Kelautan dan Perikanan
32	PERDAGANGAN		
	32,1	%	Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah urusan Perdagangan terkait Ketersediaan sarana Perdagangan
	32,2	bulan	Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah urusan Perdagangan terkait Ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat
	32,3	%	Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah urusan Perdagangan terkait Kelancaran distribusi kebutuhan masyarakat

1	2	3	4
33	PERINDUSTRIAN		
	33,1 Jumlah peningkatan pelaku usaha Industri	%	Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah urusan Perindustrian terkait Perkembangan pelaku usaha industri
	32,2 Jumlah peningkatan produk berkualitas standar	%	Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah urusan Perdagangan terkait mutu /kualitas kebutuhan masyarakat
34	TRANSMIGRASI		
	34,1 Jumlah peningkatan Tujuan Lokasi Transmigrasi	%	Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah urusan Transmigrasi terkait dengan kerjasama tujuan lokasi Transmigrasi

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 28 Februari 2011
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 28 Februari 2011
Plt. SEKRETARIS DAERAH,

Cap/ttd.

BACHARUDIN ALI
NIP. 1957 1231 1985031086

